

**KOMPLEKSITAS PERUBAHAN ALOKASI RUANG DARI EKSISTING
PERTAMBANGAN MENUJU KAWASAN EKONOMI KHUSUS
PARIWISATA DI KAWASAN TANJUNG GUNUNG KABUPATEN
BANGKA TENGAH**

Anik Endah Puspitasari

INTISARI

Pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan berbagai pihak akan menimbulkan keberagaman kepentingan. Untuk menghindari kemunculan konflik diperlukan upaya untuk mengakomodir perbedaan kepentingan berbagai pihak. Salah satu cara untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang adalah dengan pembangunan konsensus antar pihak yang berkepentingan. Rencana penggunaan lahan pada usulan KEK Tanjung Gunung di Kabupaten Bangka Tengah merupakan perubahan pemanfaatan dari bidang pertambangan ke bidang pariwisata. Meskipun antara pihak pengusul KEK dengan pihak pemegang izin usaha pertambangan telah sepakat namun sampai saat ini penetapan KEK masih belum dilakukan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menemukan *stakeholder* yang terlibat dalam proses perubahan penggunaan lahan, pemetaan regulasi yang terkait dengan proses usulan perubahan alokasi ruang, serta kendala dalam penetapan KEK sebagai tujuan awal dilaksanakannya konsensus.

Teknik analisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan penalaran induktif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap sejumlah narasumber yang dipilih secara *purposive sampling*, sedangkan data sekunder berupa dokumen dan peraturan, yang diperoleh dari instansi atau pihak terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan konsensus masih belum dapat mendukung implementasi rencana. Ketidaktepatan pemilihan *stakeholder* dalam proses konsensus menjadikan konsensus tidak dapat merepresentasikan kepentingan masing-masing pihak sehingga tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh, menyetujui kesepakatan namun mengusulkan persyaratan terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut. Konsensus yang bersifat “abu-abu” ini menyebabkan munculnya kendala dalam implementasi perencanaan. Untuk menghindari ketidaknyamanan konsensus diperlukan kajian teknis secara ilmiah dalam proses konsensus, serta diperlukan adanya suatu lembaga independen yang dapat memberikan kepastian hukum dan dapat mengatasi stagnansi proses dalam perencanaan tersebut.

Kata kunci: Bangka Belitung; KEK; Konsensus, Perubahan Penggunaan Lahan; Tambang

**COMPLEXITY OF CHANGES IN SPACE ALLOCATION FROM
MINING EXISTING TO TOURISM SPECIAL ECONOMIC ZONE IN
TANJUNG GUNUNG, BANGKA TENGAH REGENCY**

Anik Endah Puspitasari

ABSTRACT

Utilization related space with various party will cause diversity interests. To avoid the emergence of conflicts, efforts are needed to accommodate the different interests of various parties. One way to avoid conflicts of interest in the use of space is to build consensus among interested parties. Land use plan in the proposed Tanjung Gunung SEZ in Bangka Tengah Regency is a form of change in utilization from mining sector to tourism sector. Although the SEZ proposer and the mining business permit holder have agreed, so far the SEZ has not been determined. This study aims to finds stakeholders involved in the process of land use change as well as factors that become obstacles in determining SEZ as the initial goal of implementing consensus.

Techniques of analysis using a qualitative approach with inductive reasoning. Primary data were obtained through observation and in-depth interviews with a number of informants selected by purposive sampling, while secondary data were documents and regulations which were obtained from related agencies or parties.

The results showed that the success of consensus building is still can not able to make plans to be implemented. Inaccuracy of stakeholders selection in consensus process makes the consensus unable to represent the interest of each party so that the consensus cannot be carried out thoroughly. This “grey” consensus causes obstacles in planning implementation. In order to avoid the unreality of consensus, scientific technical studies are needed in consensus process. In addition, independent institution that can provide legal certainty is needed so that it can overcome stagnation in planning process.

Key words: *Bangka Belitung, Consensus, Land Use Change, Mining, SEZ*